

RELEVANSI STANDARISASI PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN PADA KURIKULUM 2013 DENGAN KONSEP PERBEDAAN INDIVIDU PESERTA DIDIK

Novan Ardy Wiyani

IAIN Purwokerto

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang relevansi antara standarisasi dalam proses pembelajaran dan penilaian pada kurikulum 2013 dengan konsep perbedaan individu pada peserta didik. Hal itu kemudian memunculkan dua pertanyaan. Pertama, apakah pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum berstandar. Kedua, dapatkah pembelajaran dan penilaian dalam perspektif kurikulum distandarkan jika dihadapkan dengan konsep perbedaan individu pada peserta didik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembelajaran dan penilaian dalam perspektif kurikulum berstandar atau memiliki standar. Namun jika dihadapkan dengan konsep perbedaan individu pada peserta didik, pembelajaran dan penilaian kurang tepat untuk distandarkan. Sebaiknya dilakukan pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pembelajaran, dari paradigma pembelajaran yang berbasis standar menjadi paradigma pembelajaran yang berbasis perbedaan individu.

Kata kunci : pembelajaran, penilaian, standar, peserta didik.

Abstract: This paper examines the relevance of standardization in the process of learning and assessment to the curriculum 2013 with the concept of individual differences in learners. It then raises two questions. First, whether the learning and assessment is in the standard curriculum. Second, can the learning and assessment is in a standardized curriculum perspective when faced with the concept of individual differences in learners. Discussion of the results showed that the learning and assessment in the perspective of standards curriculum or have standards. But when confronted with the concept of individual differences in learners, learning and assessment less suitable to be standardized. It should be a paradigm shift in the organization of learning, the learning paradigm based on the standard into the learning paradigm based on individual differences.

Keywords: learning, assessment, standards, learners,

A. PEN DAHULUAN

Disadari ataupun tidak, pendidikan menjadi suatu bidang yang setiap saat dibicarakan oleh banyak orang, mulai dari membicarakan seperti apa konsep pendidikan yang ideal hingga membahas berbagai problem krusial di bidang pendidikan. Nampaknya para akademisi lebih senang berbicara tentang konsep pendidikan yang ideal daripada berbicara mengenai berbagai problem krusial di bidang pendidikan dan mengurai benang kusut pendidikan dalam perspektif sistem dan filsafat.

Ketika para akademisi berdiskusi tentang praktik pendidikan di Indonesia, seringkali didengar kata “seharusnya”. Kata “seharusnya” tersebut memang sangatlah lekat dengan keadaan yang ideal. Namun satu hal yang harus diingat dari kata “seharusnya” yaitu jika seseorang berbicara tentang “seharusnya” maka pada dasarnya ia sedang menghadapi suatu situasi dan kondisi yang jauh dari harapannya. Misalnya begini “Pendidikan ditujukan untuk melahirkan generasi emas di tahun 2045 sebagai kado ulang tahun NKRI, maka seharusnya guru yang melahirkan generasi emas juga harus emas”. Pada kenyataannya, guru di Indonesia masih berpenghasilan rendah, penghasilannya tidak setinggi harga emas.

Lalu, yang menarik untuk diperhatikan adalah kata “seharusnya” kemudian diwujudkan oleh para pakar pendidikan di Indonesia melalui program standarisasi, mulai dari standarisasi guru, pembelajaran, penilaian, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Program standarisasi tersebut mengharuskan stakeholders pendidikan, khususnya pihak sekolah memenuhi berbagai kriteria minimal pada masing-masing standar, misalnya memenuhi kriteria minimal pada standar pembelajaran dan standar penilaian. Kini pertanyaannya, dapatkah pembelajaran dan penilaian yang masuk dalam lingkup kurikulum sebagai suatu sistem itu distandarkan? Mengapa demikian? Kedua pertanyaan tersebut akan dikaji dalam tulisan ini.

B. MENGURAI PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM

Perundang-Undangan yang dibuat, disahkan, dan diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia disebut dengan nama sistem pendidikan nasional. Misalnya pada tahun 1989, Indonesia memiliki Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pada tahun 2003, Indonesia memiliki Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mudahnya, kedua

Undang-Undang tersebut telah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem. Apa sebenarnya sistem itu?

Sistem merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jika itu ditarik dalam konteks pendidikan, maka yang dimaksud sistem pendidikan adalah serangkaian proses pendidikan yang dilakukan oleh berbagai komponen pendidikan yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jika demikian apa sajakah komponen-komponen pendidikan itu?

Ada empat komponen pendidikan, yaitu guru, peserta didik, lingkungan, dan kurikulum. Guru digadang-gadang oleh para pakar pendidikan sebagai tokoh utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ia berposisi sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan, meskipun sampai saat ini terkadang ia juga menjadi ujung tombak dalam proses pendidikan.

Kemudian peserta didik adalah raw input yang akan diproses oleh guru menjadi sosok manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional kita ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan lingkungan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan?

Berbicara tentang lingkungan maka hal itu mengingatkan kembali kepada konsep Tri Pusat Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Ia mengungkapkan bahwa Tri Pusat Pendidikan merupakan tiga ranah atau lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif sistem pendidikan nasional kita, jika merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka ketiga ranah tersebut disebut dengan istilah pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal.

Pendidikan informal merupakan proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan informal ini misalnya homeschooling. Pendidikan formal merupakan proses pendidikan yang berlangsung pada berbagai lembaga pendidikan formal secara berjenjang, seperti di TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pendidikan nonformal merupakan proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Misalnya PKBM, SKB, KB, TPQ, Majelis Ta'lim, dan sebagainya.

Sementara itu kurikulum sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan nasional merupakan software yang digunakan untuk memprogram pendidikan, agar proses pendidikan bisa dijalankan oleh guru dan peserta didik. Pada kurikulum direncanakan berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada kurikulum pula ditentukan apa sajakah materi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik agar mereka bisa menjadi sosok individu yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Keempat komponen pendidikan pada sistem pendidikan tersebut secara sederhana dapat digambarkan berikut ini :

Gambar 1
Pendidikan sebagai Sistem

Berdasarkan gambar tersebut maka sangat nampak sekali jika keempat komponen pendidikan, yaitu guru, peserta didik, lingkungan, dan kurikulum memiliki hubungan saling keterkaitan. Salah satu di antara empat komponen tersebut tidak ada yang bisa dinafikan. Semuanya sama-sama memiliki peran penting dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, sehingga jika ada pertanyaan "di antara keempat komponen tersebut manakah yang paling berpengaruh", maka akan sangat sulit untuk menjawabnya.

Satu hal yang kemudian menjadititik tolak ketika berbicara tentang sistem pendidikan nasional adalah "berbeda dengan kurikulum, guru dan peserta didik merupakan subjek pendidikan." Namun kenyataannya kini, guru dan peserta didik yang seharusnya menjadi subjek pendidikan malahan terkungkung oleh kurikulum. Guru mau apa dan peserta didik mampu apa sudah diatur oleh kurikulum, mereka tinggal menuruti saja "kehendak" kurikulum.

Pada kegiatan pembelajaran misalnya, guru mau mengajar seperti apa sudah ditentukan oleh silabus dan RPP dalam kurikulum 2013 yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemdikbud. Kemudian kemampuan peserta didik nantinya seperti apa juga telah ditentukan oleh kurikulum. Bukankah harusnya gurulah yang aktif mengembangkan kurikulum?. Bukankah seharusnya peserta didik mengembangkan kemampuannya yang sesuai dengan bakat dan minatnya, bukannya yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dalam Kurikulum 2013?

Satu lagi, misal dalam hal penilaian. Sudah barang tentu kemampuan atau kompetensi peserta didik sebagai hasil yang ia peroleh ketika belajar tidaklah sama. Mudah-mudahan dapat dikatakan bahwa antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya memiliki hasil belajar yang berbeda-beda. Perbedaan hasil belajar tersebut dikarenakan masing-masing peserta didik melalui proses pembelajaran dengan cara yang berbeda sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Jika demikian maka kegiatan penilaian harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip perbedaan individu dalam belajar, bukannya dilaksanakan "sekonyong-konyong koder" sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Fakta dan kebijakan di atas telah memposisikan kurikulum kita sebagai kurikulum yang mekanik, yang menempatkan guru maupun peserta didik sebagai objek pendidikan. Isi dari kurikulum tidak bisa diganggu gugat. Guru harus mematuhi. Guru harus melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan berbagai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013. Meminjam istilah Yosol Iriantara, akibatnya kini sekolah telah menjadi UPK Kurikulum dengan guru sebagai pekerjanya.

Padahal dalam dataran teoritis maupun filosofis, guru adalah subjek pendidikan. Ia bisa berperan aktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Namun hal itu tidak bisa ia lakukan baik karena faktor kompetensi keguruannya maupun karena kurikulum di Indonesia yang cenderung mekanik. Itulah sebab perlu dilakukan upaya menempatkan kembali (reposisi) kurikulum di Indonesia sebagai suatu sistem dinamik.

C. REPOSISI KURIKULUM SEBAGAI SUATU SISTEM DINAMIK

Ada dua pendapat yang umum dipahami oleh orang ketika mengartikan kurikulum. Pertama, kurikulum yang diartikan secara tradisional. Kedua, kurikulum yang diartikan secara modern. Secara tradisional, kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, secara modern, kurikulum diartikan sebagai seluruh kegiatan yang dilalui oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan di bawah tanggung jawab guru. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan pembelajaran,

penilaian, ekstrakurikuler, pembiasaan, karya wisata, pentas seni, dan lain sebagainya.

Berdasarkan cakupan luas kegiatan pendidikan dalam kedua pengertian tersebut, maka banyak pakar yang menyebut kurikulum tradisional dengan istilah kurikulum secara sempit dan kurikulum modern dengan istilah kurikulum secara luas. Kemudian, jika kedua pengertian kurikulum tersebut ditarik dalam konsep sistem, maka berbagai mata pelajaran menjadi komponen dalam sistem kurikulum secara tradisional. Sementara itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, misalnya kegiatan pembelajaran dan penilaian merupakan komponen dalam sistem kurikulum modern.

Pada kegiatan pembelajaran, guru memfasilitasi peserta didiknya agar mau dan mampu belajar. Harapannya, akan terjadi perubahan perilaku setelah peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan oleh peserta didik tidak hanya sekali tetapi berkali-kali sehingga terjadilah akumulasi perubahan perilaku yang terstruktur. Kegiatan penilaian pun kemudian dilakukan untuk mengetahui seperti apakah pola perubahan perilaku yang terstruktur pada peserta didik tersebut.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perubahan perilaku peserta didik akan selalu berubah-ubah sepanjang waktu sesuai dengan apa saja yang telah mereka pelajari dalam proses pembelajaran. Itulah sebabnya kegiatan pembelajaran maupun penilaian yang dilakukan oleh guru bersifat dinamis, bukan malah mekanis. Kurikulumnya pun yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus bersifat dinamis pula. Itulah sebabnya kurikulum sebaiknya ditempatkan kembali sebagai suatu sistem dinamik.

Sistem dinamik pada dasarnya merupakan sistem yang memiliki struktur dan aktivitas yang ditandai dengan pola perilaku yang berubah-ubah sepanjang waktu. Ada tiga prinsip dalam sistem dinamik. Pertama, perilaku dapat diubah melalui hubungan sebab-akibat (causal). Kedua, perilaku berubah-ubah sepanjang waktu.

Ketiga, pada perubahan perilaku terdapat struktur umpan-balik atau feedback structure ([Id.m.wikipedia.org/wiki/Dinamika_Sistem](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinamika_Sistem)).

Jadi, kurikulum sebagai suatu sistem dinamik dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan atau aktivitas terstruktur yang dilakukan oleh peserta didik agar terjadi perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai hasil belajarnya selama mereka belajar. Ada empat prinsip dalam kurikulum sebagai suatu sistem dinamik. Pertama, perubahan perilaku pada peserta didik

dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Kedua, perilaku peserta didik berubah-ubah selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, perubahan perilaku peserta didik dapat diketahui melalui pemberian umpan balik secara terstruktur dengan melakukan kegiatan penilaian secara terstruktur pula. Keempat, perubahan perilaku yang berbeda-beda pada peserta didik sebagai hasil belajarnya.

Perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik melalui proses pembelajaran dapat dipetakan ke dalam tiga ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Masing-masing ranah pembelajaran tersebut memiliki strukturnya sendiri, mulai dari level yang terendah hingga level yang tertinggi. Level-level tersebut dibedakan dengan kata kerja operasional. Pencapaian pada level-level tersebut sangat dipengaruhi oleh potensi dan kemampuan individu peserta didik. Masing-masing individu peserta didik pun memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, alhasil pencapaian level baik pada aspek kognitif, afektif, maupun konatif pun berbeda-beda pula.

D. RANAH PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN DALAM PERSPEKTIF KURIKULUM : STANDARISASI VIS A VIS PERBEDAAN INDIVIDU

Pada kurikulum 2013 terjadi pergantian paradigma pembelajaran dari behavioristik ke konstruktivistik, dari yang tadinya peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik aktif mencari tahu. Dalam pembelajaran, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri difasilitasi oleh guru. Pendekatan saintifik pun digadang-gadang sebagai pendekatan yang paling pas untuk digunakan dalam paradigma pembelajaran konstruktivistik.

Abdul Majid menyebut pendekatan saintifik tersebut dengan istilah pendekatan ilmiah. Ia mengungkapkan bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi pembelajaran dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Hal itu menjadikan kondisi pembelajaran diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mencari tahu berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu (Majid, 2014: 193).

Lebih lanjut Abdul Majid mengungkapkan bahwa pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan (konatif) peserta didik (Majid, 2014: 195). Kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek.

Afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Sedangkan konatif/perilaku adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Kognitif, afektif, dan konatif itulah yang kemudian dijadikan sebagai ranah utama yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Masing-masing ranah tersebut secara terstruktur memiliki level, di mana perbedaan pada tiap level ditunjukkan oleh kata kerja operasional.

Bermawi Munthe (2009: 40) mengungkapkan bahwa ranah kognitif terdiri dari enam level dengan kata operasional sebagai berikut :

Pencapaian terhadap ketiga ranah pembelajaran tersebut kemudian diatur dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Hampir sama dengan pendapat Bermawi Muthe, level perubahan dalam ranah kognitif, afektif, dan konatif pada Standar Proses dirinci sebagai berikut :

Pada Standar Proses diungkapkan bahwa proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah pembelajaran secara utuh/holistik. Ini berarti, pengembangan ranah yang satu tidak dapat dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan kognitif, afektif, dan konatif. Namun dua hal yang patut untuk dipertanyakan.

Pertama, bukankah kualitas pribadi peserta didik itu berbeda-beda? Pada sebuah kelas misalnya, tidak semua peserta didik bisa mencapai level perubahan tertinggi dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Perbedaan pada pencapaian terhadap level-level perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor perbedaan individu. Kedua, jika demikian dapatkah pembelajaran distandarkan jika dihadapkan dengan konsep perbedaan individu peserta didik?

Betul jika kualitas peserta didik yang dihasilkan melalui proses pembelajaran berbeda-beda. Kemudian kemampuan belajar individu pun berbeda-beda. Hal itu menjadikan pembelajaran kurang tepat jika dilaksanakan secara berstandar. Suatu standar pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah misalnya, mungkin bisa dipenuhi oleh peserta didik yang berada di perkotaan karena secara eksternal mereka memiliki berbagai fasilitas pendukung

proses pembelajaran dan secara internal kepemilikan fasilitas tersebut telah memunculkan minatnya yang tinggi untuk belajar sehingga terpenuhilah berbagai level perubahan dalam ranah kognitif, afektif ataupun konatif sesuai dengan Standar Proses. Sementara itu, bagaimana dengan peserta didik yang ada di pedesaan ataupun yang ada di pedalaman yang kepemilikan fasilitas belajarnya masih terbatas? dan sudah barang tentu minat belajarnya juga berbeda dengan minat belajar peserta didik yang ada di perkotaan. Berdasarkan fakta di atas, maka sebaiknya pembelajaran dilaksanakan dengan didasari prinsip perbedaan individu. Istilah lainnya adalah pembelajaran berbasis perbedaan individual, bukannya pembelajaran berbasis standar.

Dalam dataran filosofis dan tinjauan agama kita ketahui bahwa secara sunnatullah manusia diciptakan secara beragam bukan seragam. Sejak kelahirannya, manusia tumbuh dan berkembang ditentukan oleh apa yang di bawa sejak lahir dan dipengaruhi oleh berbagai pengalaman yang didapatkan dari lingkungannya masing-masing. Hal itu menjadikan manusia atau dalam hal ini peserta didik lebih banyak memiliki berbagai perbedaan dengan peserta didik lainnya. Dalam konteks pembelajaran, perbedaan individu tersebut sudah barang tentu akan berdampak pada adanya perhatian, minat, cara dan kemampuan belajar peserta didik yang berbeda-beda pula. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik yang optimal guru diharapkan memperhatikan perbedaan individu peserta didiknya.

Implementasi konsep belajar tuntas atau *master learning* dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis perbedaan individual. Pembelajaran berbasis perbedaan individual tersebut dilaksanakan dengan prinsip utama "kemampuan peserta didik tidaklah sama, ada variasi terhadap kemampuan peserta didik dalam pembelajaran". Model pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan baik secara klasikal, kelompok maupun individu. Pada implementasinya, peserta didik belajar dengan mendengar penjelasan guru, membaca secara mandiri dan terkontrol, berdiskusi, dan belajar secara individual.

Ada tiga jenis layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran mengacu pada konsep belajar tuntas. Pertama, bagi peserta didik yang lamban kemampuan belajarnya diberikan kegiatan remedial. Kedua, bagi peserta didik yang sedang kemampuan belajarnya diberikan kegiatan pengayaan. Ketiga, bagi peserta didik yang cepat kemampuan belajarnya diberikan program layanan akdelerasi/percepatan.

Kemudian jika pembelajaran diarahkan pada perbedaan individu, maka penilaiannya pun juga harus didasari pada prinsip perbedaan individu pula. Jadi

dapatlah dikatakan, penilaian pun kurang tepat jika distandarkan jika dihadapkan pada konsep perbedaan individu. Standarisasi penilaian dalam pembelajaran diatur oleh pemerintah dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Pada pembelajaran berbasis perbedaan individu, suatu kegiatan penilaian dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis dan bentuk tagihan penilaian secara berkelanjutan. Tingkat ketuntasan belajar yang pun tidak diukur dari pemenuhan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dibuat berdasarkan standar kompetensi (dalam kurikulum 2013 diganti dengan istilah kompetensi inti) maupun kompetensi dasar, tetapi diukur dari performance peserta didik dari setiap kegiatan pembelajaran.

E. KESIMPULAN

Kurikulum sebagai suatu sistem saat ini lebih bersifat mekanik. Kurikulum telah menjadikan guru dan peserta didik sebagai objek pendidikan, padahal seharusnya mereka menjadi subjek pendidikan. Kurikulum yang cenderung mekanistik tersebut dikarenakan kini semua lini pendidikan, termasuk lini pembelajaran dan penilaian telah distandarisasi. Pihak sekolah diharuskan memenuhi standar tersebut.

Pembelajaran dan penilaian berstandar atau memiliki standar dengan diberlakukannya Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jika kedua standar tersebut dihadapkan pada konsep perbedaan individu, maka standarisasi tersebut tidaklah tepat untuk distandarkan. Sebaiknya dilakukan pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pembelajaran, dari paradigma pembelajaran yang berbasis standar menjadi paradigma pembelajaran yang berbasis perbedaan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Id.m.wikipedia.org/wiki/Dinamika_Sistem
Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
Lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Lampiran Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
Majid, Abdul. 2014. *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung : Rosda.
Munthe, Bermawi. 2009. *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta : Insan Madani.